

Etnis Tionghoa Dan Politik
Studi Kasus Elit Etnis Tionghoa Dalam Kepengurusan Partai Politik Pdi-P Dan Gerindra
Di Kota Semarang Periode 2009-2014

Oleh

(Yusuf Rahmat, Drs Purwoko, MS; Drs. Achmad Taufiq, Msi)

Jurusan ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, tembalang, Semarang, Kode pos 1269

Website:<http://www.fisip.undip.ac.id> ; email:fisip@undip.ac.id

ABSTRAKSI

Alasan yang melatarbelakangi penulis dalam karya ilmiah adalah memberikan gambaran akan pola politik etnis Tionghoa yang tergabung dalam suatu struktur partai politik jabatan public melalui pemilu. Fenomena ini menjadi menarik untuk ditelisik, karena keterlibatan elit partai etnis Tionghoa di suatu kancah perpolitikan ini memiliki banyak motif untuk aktif dalam suatu kegiatan.. keadaan lain yang mendukung adalah berbagai macam produk hukum maupun kondisi social, ekonomi dan perpolitikan yang makin menunjukkan kea rah yang perbaikan.

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah ingin menangkap dan menjelaskan perilaku elit politik etnis Tionghoa dan elit lain tentang keberadaan etnis Tionghoa dalam suatu kepengurusan partai Gerindra dan PDIP di kota Semarang. Selain itu ingin melihat adanya sebuah korelasi antara latar belakang politik, kontribusi peran dan fungsinya di partai politik, serta hambatan dan tantangan yang dihadapi di kelembagaan partai secara internal dan eksternal partai baik Gerindra maupun PDI-P kota Semarang

Metodelogi penelitian yang digunakan penulis disini adalah dengan menggunakan penelitian kualitatif, dengan penelitian yaitu snow ball yang merupakan metode dengan menggunakan interview guide secara mendalam dan terstruktur sebagai salah satu pengumpulan data dengan memberikan gambaran umum sebagai hasil kesimpulan keseluruhan isi kuesioner dan analisis interviewing yang merupakan metode berdasarkan pada cerita dan interpretasi dari informan yang memberikan gambaran akan perilaku elit politik etnis Tionghoa di Kota Semarang di era reformasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa factor keterlibatan elit etnis Tionghoa ini sendiri adalah landasan sosiologis yaitu pimpinan partai Politik, dukungan dari keluarga dan teman. Pelibatan actor politik (elit politik) etnis Tionghoa di kancah pergulatan social masih terbilang minim. Elit

politik etnis Tionghoa yang tergabung dalam struktur politik masih berkuat dalam sisi ekonomi. Peran dan fungsi dari elit etnis Tionghoa di tataran struktur partai Gerindra dan PDI-P masih terbilang minim, seharusnya elit Tionghoa harus mampu melihat bahwa politik bukanlah sebagai pekerjaan sampingan namun sebagai tugas yang harus orientasi jangka panjang serta memilah dan mengembangkan potensinya secara lebih serius ketika memilih sebagai pengurus elit partai baik dari peran dan fungsinya cukup strategis

Kata kunci : elit Politik, etnis Tionghoa, partai politik, struktur politik PDIP dan Gerindra

Tionghoa and politic
Case Study Tionghoa elite in managing political party PDI-P and Gerindra in the city of Semarang Period 2009-2014

ABSTRACTS

The reason why the writer focuses on this study is the political of Tionghoa in a structure of political party in kota Semarang period 2009 until 2014 there is an interesting phenomenon because Tionghoa joining in a political activities. Another condition, which tend to better in condition.

The purpose of this study is that the writer would like to catch and to explain elite politics behavior of Tionghoa about the existence of this ethnic in managing Gerindra Party and PDI-P in Semarang. Beside, the writer would like to see the whether there is a correlation between political background of Tionghoa, its contribution and function in a political party, and also the problem found in organizing internal or external party of gerindra or PDI-P in Semarang

The method user by the writer is qualitative research, in term of snow ball method and structural interview guide as one of the technique in collecting data. The Writer gave his general poin of view as the result of the whole content of questionarries and analyzing interviewing as a method based on someone's interpretation that give a real description of elite politic behaovior of Tionghoa in Semarang at this present reformation era

The result of this study showed that Tionghoa elite politic joining in political party is a sociological base a the leader of those parties, family and friends support. The joining of political actor of tionghoa in social activity is still low. Tionghoa political actors in political structure are tend to economical side. Tionghoa polical actors should be able to see that politic is not only as someone's side job but also a kind of serious duty and long term oriented to develop its potential function seriously when choosing the actors from their strategically position.

Key word : elit Politic, Tionghoa, political party, political structure, gerindra and PDI-P

A. PENDAHULUAN

Keberadaan etnis Tionghoa Selalu diwarnai berbagai macam peristiwa yang menarik untuk diamati di ranah politik di Indonesia dan tiap orde pemerintahan Indonesia.

Hal ini tentu saja berdampak pada sikap dan perilaku elit politik etnis Tionghoa dari masa ke masa, baik dari masa colonial, orde lama, orde baru, hingga terakhir orde reformasi.

Menurut Pandangan Ong Hok Ham¹ salah satu sejarawan terkemuka di Indonesia, dimana menyebutkan, “masyarakat Tionghoa bukanlah kelompok yang homogen; mereka begitu beragam hampir seperti kepulauan Indonesia.” Pandangan umum terhadap etnis tionghoa di Indonesia yang notabene adalah keturunan tionghoa, memiliki pandangan yang beragam di masyarakat Indonesia sendiri. Hal ini dapat dilihat dari sisi stereotipe yang melekat dalam etnis Tionghoa yang identik dengan penguasaan sumber ekonomi, individualis, in-group feeling yang kuat dan rendahnya perhatian terhadap politik ataupun alienasi terhadap hal- hal yang berkaitan dengan politik praktis.

Disahkannya Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI dan UU No. 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnik, telah menjadi angin segar bagi WNI keturunan Tionghoa. Meskipun ada kecenderungan masyarakat yang melihat dengan cara pandang yang berbeda pula. Ini dapat dilihat dari hasil survey dengan pernyataan “keturunan Tionghoa” bukan termasuk warga Negara Indonesia asli, walaupun mereka telah menjadi WNI sejak kelahirannya”² terdapat 38 % yang menyatakan setuju, 37 % ragu-ragu dan 25 % diantaranya menyatakan tidak setuju. Artinya masih banyak orang jawa yang memandang bahwa orang Cina bukan WNI “asli”

Dewasa ini setelah era reformasi berjalan hingga 13 tahun lebih, idealnya etnis Tionghoa sudah optimal dalam hal eksistensinya di bidang politik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai macam etnis tionghoa yang terlibat dalam struktur kepengurusan partai politik, menduduki jabatan eksekutif maupun legislative baik dari tingkat

¹ Suhardinata, Dr. Ir Justian.2009. *WNI Keturunan Tionghoa dalam stabilitas Ekonomi dan Politik Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia pustaka Utama hal. 9

nasional dan daerah. Hal ini tentu saja menjadikan golongan menengah etnis Tionghoa hari ini dapat disebut sebagai elit etnis Tionghoa di bidang politik.

Partai politik dimana merupakan salah satu saluran bagi masyarakat untuk menyalurkan minat dan bakatnya dalam hal politik, termasuk salah satunya adalah etnis Tionghoa. Keterlibatan etnis Tionghoa dalam suatu periode dalam struktur politik merupakan suatu hal yang menarik untuk dibahas.

Hal ini lantaran etnis Tionghoa geliat hasrat politik etnis Tionghoa dalam kancah politik ini tentu akan memberikan warna baru dalam kehidupan politik yang ada. Hal ini tentu saja memberikan harapan dan gambaran baru, bahwasanya politik adalah merupakan ruang bebas yang dapat diakses oleh semua golongan. Selain itu keberadaan etnis Tionghoa pun dalam politik menjadi pembuktian kepada masyarakat bahwa kebedaannya dalam politik merupakan hal yang positif dan menghilangkan stereotif yang dilekatkan selama ini.

Pasca reformasi dan lengsernya presiden Soeharto, masyarakat Indonesia telah memulai babak baru dalam system pemerintahan dan politik dengan menciptakan perubahan menjadi lebih demokratis. Hal ini dapat dilihat dari adanya daerah diberikan kemampuan untuk pemilu hingga Pemilihan DPRD secara langsung.

Publikasi media pun menunjukkan hal yang serupa bahwasanya. Sepanjang pemilu legislative dan pilpres mencatat beberapa perkembangan. Selama pemilu legislative sejumlah media mencata setidaknya 150 caleg Tionghoa,³ meskipun pada akhirnya hanya sebagian kecil yang berhasil mendapatkan kursi.

Di tahun 2009 bahkan pemilihan sendiri kita diberikan hak langsung untuk memilih calon DPR dari tingkat pusat hingga daerah secara langsung. Hal ini tentu saja memberikan kemudahan dan tantangan bagi etnis Tionghoa untuk dapat memberikan daya imajinasinya dengan kekuatan modal politik dan modal social yang dimiliki untuk mendapatkan kekuasaan dan menjadi elit politik di tingkat legislative maupun eksekutif. Hal ini dapat dilihat dari fenomena beberapa etnis Tionghoa yang menjadi kepala daerah seperti Basuki Tjahaya purnama (ahok) dalam pemilihan kepala daerah Jakarta, adanya muncul calon kepala daerah win cin dari bupati banjarnegara meskipun tidak terpilih, bahkan di Kota Semarang yang sempat dihiasi

oleh calon dari etnis Tionghoa yaitu Kristanto sebagai wakil walikota Semarang. Hal ini tentu menunjukkan bahwa etnis Tionghoa telah menjadi magnet bagi perkembangan politik dewasa ini.

Semakin terbukanya kran demokrasi di masyarakat Indonesia dan munculnya kesadaran berpolitik dari etnis Tionghoa ini pun menjadi peluang dan tantangan tersendiri untuk mengartikulasikan kepentingan politik mereka dalam struktur politik untuk dapat semakin matang berproses di lembaga politik macam partai politik. Maka dari itu penulis mencoba melihat bagaimana elit etnis Tionghoa dalam konstelasi politik yang ada di pengurus PDI-P dan Gerindra.

B. PEMBAHASAN

Berbicara mengenai partai politik di tataran Jawa Tengah, selalu tidak akan lepas dari kaitan budaya politik yang berkembang di Jawa Tengah itu sendiri. Masyarakat Jawa Tengah lebih dikenal sebagai “*kandang banteng, rumah Nasionalis abangan*”. Hal ini tentu membawa pertarungan yang sengit bagi partai-partai politik untuk bertarung dan mengisi para kader-kadernya untuk mampu duduk dalam posisi elit partai di pemerintahan baik itu dari tingkat DPRD, baik dari skala kota maupun provinsi maupun dalam pemilihan kepala daerah dari level walikota hingga gubernur. Selain itu kehadiran budaya politik di tataran kota Semarang yang kental dengan budaya nasionalis ini pun melahirkan partai berideologi nasionalis dan religius lebih dapat diterima di kota Semarang.

Menurut Morris Rossberg mengemukakan ada tiga (3) alasan mengapa orang tidak mau berpartisipasi dalam kehidupan politik.⁴ *pertama*, karena ketakutan akan konsekuensi negative dari aktivitas politik. Dimana politik dianggap sebagai ancaman dalam hidupnya kelak. *Kedua*, orang beranggapan bahwa berpartisipasi dalam

⁴ *Ibid. hal 156*

kehidupan politik merupakan kesia-siaan. Dia merasa sia-sia, karena partisipasi politiknya tidak akan mempengaruhi proses politik. *Ketiga*, karena tidak adanya perangsang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Sedangkan menurut Frank Lindenfeld, menemukan bahwa faktor utama yang mendorong orang berpartisipasi dalam kehidupan politik adalah kepuasan financial. Hal ini dalam penelitiannya diungkapkan bahwa status ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang merasa teralienasi dari kehidupan politik, sehingga menjadi apatis.

Keterlibatan etnis Tionghoa di partai gerindra dan PDI-P

Selain itu ada pandangan dari Milbraith, menyebutkan empat (4) faktor utama yang mendorong adanya orang berpartisipasi dalam suatu politik. *Pertama*, adanya perangsang, maka orang akan berpartisipasi dalam politik. Misal : keikutsertaan dalam mengikuti diskusi formal maupun berita di mass media. *Kedua*, faktor karakteristik pribadi seseorang. Orang-orang yang memiliki watak sosial, akan lebih memiliki kepedulian besar dalam problem sosial, ekonomi, politik. *Ketiga*, faktor karakter sosial seseorang. Karakter sosial menyangkut masalah status ekonomi, kelompok ras, kelompok etnis dan agama seseorang. Lingkungan sosial itu akan mempengaruhi persepsi, sikap dan perilaku seseorang dalam bidang politik. Orang yang dari lingkungan sosial akan lebih rasional an menghargai nilai-nilai seperti keterbukaan, kejujuran dan keadilan. *Keempat*, faktor situasi atau lingkungan politik itu sendiri. Lingkungan politik yang kondusif akan membuat orang mau terlibat dalam politik. Selain faktor-faktor diatas, ada faktor-faktor lain adalah syarat legal formal suatu system pemilihan, sifat dari system partai politik, dan ciri kepemimpinan yang dikembangkan oleh suatu partai politik.

Dari data temuan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, bahwasanya keterlibatan elit partai etnis Tionghoa di Gerindra maupun ada beberapa factor. 4 faktor besar yang melatarbelakangi elit partai etnis Tionghoa adalah : *pertama*, latar belakang etnis Tionghoa itu sendiri, *kedua*, figure pemimpin partai; *ketiga*, citra

ideologis, *keempat*, peran dari keluarga. Hal ini yang menjadikan mengapa mereka memilih suatu partai politik tersebut dalam sikap politik mereka dalam politik praktis. Selain itu data temuan selanjutnya mengenai adanya elit dinasti yang terdapat di partai politik pada PDI-P kota Semarang. Di PDI-P nuansa elit dinasti memang terasa, bahkan keberadaan etnis Tionghoa sendiri terdapat dinasti (regenasi keluarga) dalam struktur PDI-P kota Semarang. Sedangkan elit dinasti yang ada di Gerindra sendiri belum terlihat baik itu dari etnis Tionghoa maupun yang lainnya. Hal ini lantaran partai ini adalah partai yang masih terbilang baru dan ini diyakini oleh para pengurusnya bersangkutan.

Berdasarkan hasil temuan wawancara di lapangan ditemukan adanya perbedaan peran dan fungsi elit partai etnis Tionghoa baik di PDI-P dan Gerindra di kota Semarang, bahkan di tataran elit etnis Tionghoanya sendiri. Hal ini lantaran adanya *power* (kekuasaan) dan *authority* (wewenang) yang dimiliki seseorang elit etnis Tionghoa ini sendiri baik di partai PDI-P dan Gerindra. Dari 3 Informan yang berhasil di wawancarai adanya gambaran bahwa peran dan fungsi yang di tampilkan sendiri dalam keterlibatannya dalam dunia politik masih terbilang minim.

Keterbatasannya atau minimnya peran dari mereka ini di tengarai akibat sikap dan perilaku yang lebih mengutamakan sisi ekonomi dan memandang politik belum sebagai hal yang prioritas. Meskipun secara insting politik sendiri etnis Tionghoa ini masih ada kecenderungan untuk mendapatkan kuasa. Ini dapat dilihat dari motivasi mereka yang masuk dalam struktur dan berniat untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD kota Semarang maupun yang menduduki DPRD provinsi Jateng

Peran yang ditampilkan etnis Tionghoa ini dalam kehidupannya di structural partai politik terbilang masih minim, hal ini dapat dilihat dari peran serta mereka dari sisi aktifitas dan peran serta elit etnis Tionghoa dalam rekrutmen kader, pencalegan, penentuan kepala daerah, perluasan jaringan dapat dikatakan masih minim. Namun, dalam sisi pendanaan partai mereka memang dapat memberikan sumbangan banyak, meskipun ini dilihat dari karakteristik social dan ekonomi elite etnis Tionghoa tersebut.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan tentang Perilaku elit politik etnis Tionghoa di kota Semarang baik di partai PDIP-P dan Gerindra, antara lain sebagai berikut :

1. Dengan bergulirnya era reformasi pada tahun 1998, etnis Tionghoa yang tergabung dalam elit partai di tubuh partai PDIP-P dan Gerindra telah berhasil mendapatkan hak berpolitiknya secara lebih berani dan terbuka. Hal ini dapat dilihat dari tersebarnya berbagai macam elit etnis Tionghoa yang menggabungkan dirinya melalui partai politik baik itu dari partai Nasionalis maupun dari partai yang memang beraliran islam. Selain itu munculnya kelas menengah dari kalangan etnis Tionghoa yang berhasil menduduki baik di jabatan di level legislative maupun eksekutif yang semakin meningkat dari segi kuantitas.
2. Factor-faktor keterlibatan elit politik etnis tionghoa yang tergabung dari partai Gerindra dan PDIP-P di kota Semarang Memiliki kaitan erat dengan ideology, pengakuan akan etnis Tionghoa dalam hak politik serta kenyamanan dalam menjalankan bisnis mereka.
3. Peran dari elit etnis Tionghoa ini sendiri dalam suatu pengurusan dinilai masih terbilang minim. Hal ini lantaran adanya hubungan antara penilaian secara peran baik dari tugas dan fungsinya sebagai pengurus lebih diwarnai untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi dan kenyamanan baik itu mendapatkan kekuasaan yang lebih mudah ataupun kenyamanan untuk mendapatkan hubungan relasional di etnis Tionghoa sendiri.

D. REKOMENDASI

1. Elit politik etnis Tionghoa sejak reformasi ini masih diwarnai dari segi peningkatan kuantitas, namun minim dari segi kualitas. Hal ini lantaran adanya stigma buruk terhadap etnis Tionghoa untuk merangsek sebagai politisi di kota Semarang. Seharusnya elit politik ini membangun kerjasama dengan stakeholder yang ada untuk mengembangkan minat dan kemampuannya dalam berpolitik dalam membentuk jaringan dan merawat jaringan yang ada.
2. Factor keterlibatan dari etnis tionghoa ini sendiri masih banyak di dominasi dari landasan sosiologis yaitu pimpinan, keluarga teman. Pelibatan actor politik (elit

politik) etnis Tionghoa di kancah pergulatan social masih terbilang minim baik secara terbuka, elit tionghoa masih berkuat dalam sisi ekonomi dan kebudayaan. Seharusnya elit politik harus lebih memiliki jiwa social untuk membangun modal social dan modal politik untuk mampu membangun elit politik yang tangguh ke depan dan menghindarkan dari dugaan bahwasanya etnis Tionghoa lebih cenderung pada ekonomi daripada social.

3. Peran dari fungsi dari elit etnis Tionghoa di tataran partai Gerindra dan PDI-P terbilang minim, seharusnya elit etnis tionghoa harus mampu melihat bahwasanya politik bukan lah sebagai pekerjaan sampingan namun sebagai tugas yang harus diemban secara serius dan serta memiliki orientasi jangka panjang. sebagai role model yang positif bagi perkembangan dan gambaran kepada masyarakat bahwasanya mereka dalam menjalankan tugasnya mampu bersikap professional, cerdas, dan strategis serta perhatian terhadap kehidupan rakyat sesuai dengan garis pedoman kerja (ideology) partai elit etnis Tionghoa tersebut melibatkan diri.

E. DAFTAR RUJUKAN

<http://fandyiain.blogspot.com/2011/01/prasangka-dan-diskriminasi-jawa-cina.html> dalam artikel Prasangka Dan Diskriminasi Jawa-Cina (Prasangka Dan Diskriminasi Potensi Pemicu Konflik Antara Etnis Jawa Dan Cina (Tionghoa))

<http://fandyiain.blogspot.com/2011/01/prasangka-dan-diskriminasi-jawa-cina.html>

Lexy J. Meleong. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Partisipasi Politik Tionghoa dan Demokrasi oleh **Christine Susanna Tjhin diakes tanggal 15 july 2011 sumber** : <http://iccs.wordpress.com/2006/10/14/partisipasi-politik-tionghoa-dan-demokrasi/>

http://www.gandingo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=22:etnis-tionghoa-di-indonesia-ikut-bertarung-dalam-pemilu-legislatif&catid=3:artikelberita&Itemid=11

Maran, Rafael raga. 2001. Pengantar Sosiologi Politik.. Jakarta: PT. Rineka Cipta